

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN ORDE BARU, ORDE REFORMASI DAN ERA OTODA: SEBUAH PENILAIAN

Contributed by M. Husein Sawit

Sebelum krismon melanda Indonesia di pertengahan 1997, Indonesia telah menjadi salah satu negara berkembang yang mampu dengan cepat mengurangi jumlah orang miskin dan jumlah RT (rumah tangga) yang rawan pangan (food insecurity).

Antara kemiskinan dan risiko rawan pangan berkorelasi erat dan positif, karena di dalamnya terkandung daya jangkau RT miskin terhadap pangan. Pada tahun 1996, BPS melaporkan bahwa jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang menjadi 22,5 juta orang atau sekitar 11% dari penduduk Indonesia.

Rumah tangga miskin masih didominasi di wilayah perdesaan, diperkirakan mencapai sekitar 68%. Mereka pada umumnya adalah orang miskin kronis karena mereka menguasai lahan marginal yang produktivitas rendah seperti lahan kering, lahan gambut atau pasang surut yang umumnya memproduksi pangan bukan padi. Demikian juga, orang miskin bertumpuk di wilayah pantai yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan menangkap ikan di laut dengan memakai alat tangkap tradisional dan areal penangkapan begitu padat dan lebih tangkap (over fishing). Di wilayah perkotaan, sebagian besar penduduk miskin bergantung pada pekerjaan informal, mereka bertempat tinggal di tanah negara yang berdekatan dengan rel kereta api atau bantaran sungai. Mereka memperoleh pendapatan yang tidak menentu demikian juga akses pangan.

Sejak krismon, jumlah orang miskin bertambah, mereka adalah orang miskin baru (transient poverty) karena pengangguran dan meningkatnya harga khusus harga pangan. BPS dalam terbitan terakhir memperkirakan jumlah orang miskin pada Agustus 1999 mencapai 24,2 juta orang, atau 1,7 juta lebih tinggi dari jumlah orang miskin tahun 1996. Simatjuntak (2000) menaksir, pada tahun 1998 sekitar 5 juta orang pengangguran penuh, 30 juta setengah menganggur, dan 4 juta pengangguran yang cukup serius.

Kemiskinan absolut dan pengangguran berkaitan erat dengan ketidaktahanan pangan dan kekurangan gizi (malnutrition). Jalal dan Atmojo (1997) melaporkan bahwa penduduk yang pendapatannya kurang dari Rp 40.000/bulan, membelanjakan untuk keperluan energi rata-rata di bawah 2.100 Kcal/hari yang merupakan standar energi minimum yang diperlukan penduduk Indonesia. Banyak keluarga miskin mengurangi kualitas beras yang dikonsumsi, mengurangi protein yang berasal dari daging, ikan demikian juga sayur dan buah-buahan. Akan tetapi ditingkat nasional, selama krismon tidak terlihat perubahan drastis tingkat konsumsi energi dan protein seperti yang dilaporkan BPS (1998). Tingkat konsumsi energi tahun 1996 dan 1998 masing-masing adalah 2.046 dan 2.040 Kcal/per hari, demikian juga konsumsi protein 60,29 and 60,89 gram/hari masing-masing untuk tahun 1996 dan 1998 (Table 1). Hal ini diyakini oleh banyak peneliti bahwa dengan adanya JPS pangan khususnya program OPK beras telah mampu melindungi RT dari kekurangan pangan yang serius (Tabor and Sawit 1999, Irawan 2000).

Selama periode krisis tahun 1997 dan 1998, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan meningkat mengikuti hukum Engel. Pangsa pengeluaran untuk pangan selama tahun 1998 masing-masing sebesar 69% dan 54% untuk perdesaan dan perkotaan yaitu meningkat karena penurunan pendapatan riil (Table 2). Pangsa pengeluaran untuk padi-padi meningkat baik di desa maupun di kota, sedangkan pangsa pengeluaran untuk makanan jadi (prepared food) merosot amat tajam, karena makanan jadi umumnya berasal dari impor yang harganya menjadi lebih mahal dalam Rp. Tahun 1987 umpanyanya, pangsa pengeluaran untuk prepared food telah mencapai 17% di perkotaan dan 8% di perdesaan, namun pada tahun 1998, pangsa ini berkurang secara drastis yaitu menjadi 8% dan 5% masing-masing di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tujuan makalah ini adalah menganalisa kebijakan ketahanan pangan selama Orde Baru dan Orde Reformasi, kekuatan dan kelemahannya. Kemudian terakhir didiskusikan pembangunan ketahanan pangan dalam kerangka otonomi daerah (Otda).

PENGETIHAN KETAHANAN PANGAN DAN UU NO.7/1996

Definisi ketahanan pangan berubah dari waktu ke waktu. Dalam periode 1970an, ketahanan pangan hanya menitikberatkan pada ketersediaan pangan tingkat nasional, sedangkan pada tahun 1990an, Untuk mengetahui selengkapnya dapat menghubungi penulis

PENULIS

M. Husein Sawit lahir di Sigli, Aceh, 25 Nopember 1947. Menyelesaikan pendidikan S-1 (SE) dari Fakultas Ekonomi UGM (1974), S-2 (MSc.) dalam bidang Agricultural Development Economics dari Australian National University (ANU), Canberra Australia (1983); dan S-3 (PhD) dalam bidang Economics dari University of Wollongong, NSW Australia

(1994). Pernah menjadi visiting fellow di Department of Economics ResPacs, ANU (1993); memperoleh training di World Bank Washington DC (1985) dan Cornell University, Ithaca AS (1994).

Menjadi peneliti ekonomi pertanian dan perdesaan di Survei Agro Ekonomi (SAE) 1974-1982, dan di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (PSE) Badan Litbang Pertanian (1983-sekarang); sebagai Ahli Peneliti Madya dalam bidang Ekonomi Pertanian (1999-sekarang). Menjadi Tim Ahli Kepala Bulog dalam bidang Kebijakan Pangan (1995-1999); Staf Ahli Menteri Pangan dan Hortikultura dalam bidang Pemasaran Pangan (1999-2000); Direktur Kerjasama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga, Bulog (2000-sekarang). Aktif membimbing thesis mahasiswa pasca sarjana (S2 dan S3) di jurusan Sosek IPB; menulis sejumlah artikel di berbagai jurnal ilmiah di dalam negeri dan luar negeri; editor jurnal ilmiah antara lain di UNILA, UGM, PERHEPI. Editor sejumlah hasil penelitian yang dipublikasikan menjadi buku, terakhir Ekonomi Gula Indonesia (1999) oleh IPB Press. Aktif di PP PERHEPI dan Yayasan Agro Ekonomika.

Email: mhs@indo.net.id atau mhsawit@yahoo.com Atau melalui Administrator: admin@agroprima.com